

## Anti-Corruption Education from an Early Age in Preventive Efforts Corruption Act

Rolib Sitorus<sup>1\*</sup>, Elvina Tanoto<sup>2</sup>

Universitas Pelita Harapan

**Corresponding Author:** Rolib Sitorus [rolib.sitorus@uph.edu](mailto:rolib.sitorus@uph.edu)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Education, Corruption, Family, Students, Society

*Received :* 02, November

*Revised :* 21, November

*Accepted:* 19, December

©2024 Sitorus, Tanoto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Anti-corruption education is one of the important discussions in the development of the state in Indonesia today, so in relation to this, the purpose of this study is to determine the factors that influence the success of anti-corruption education in the family environment, for the role of parents in instilling anti-corruption values in children from an early age, and to determine an effective education model to be applied in the family in order to form an anti-corruption character in children. This study uses a qualitative descriptive method. The results achieved are that anti-corruption education in the family environment is an important foundation in forming the character of individuals with integrity. The success of this effort is greatly influenced by various interrelated factors. Overall, the success of anti-corruption education in the family environment is the result of a complex interaction between internal and external factors. To achieve optimal results, integrated efforts are needed from all parties, including parents, schools, and the community. Anti-corruption education in the family is an important foundation in building the character of children with integrity.

---

## Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini Dalam Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi

Rolib Sitorus<sup>1\*</sup>, Elvina Tanoto<sup>2</sup>

Universitas Pelita Harapan

Corresponding Author: Rolib Sitorus [rolib.sitorus@uph.edu](mailto:rolib.sitorus@uph.edu)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pendidikan, Korupsi, Keluarga, Mahasiswa, Masyarakat.

*Received :* 02, November

*Revised :* 21, November

*Accepted:* 19, Desember

©2024 Sitorus, Tanoto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu pembahasan penting dalam perkembangan bernegara di Indonesia saat ini, maka sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan anti-korupsi di lingkungan keluarga, untuk peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi pada anak sejak dini, serta untuk mengetahui model pendidikan yang efektif untuk diterapkan dalam keluarga guna membentuk karakter anti-korupsi pada anak. Penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif. Hasil yang dicapai adalah bahwa pendidikan anti-korupsi di lingkungan keluarga merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Keberhasilan upaya ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara keseluruhan, keberhasilan pendidikan anti-korupsi di lingkungan keluarga adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan upaya yang terpadu dari semua pihak, termasuk orang tua, sekolah, dan masyarakat, Pendidikan anti-korupsi dalam keluarga merupakan fondasi penting dalam membangun karakter anak yang berintegritas.

---

## PENDAHULUAN

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah serius dan merata di negara kita. Tindakan korupsi yang semakin canggih dan sering terjadi telah menciptakan lingkungan yang subur bagi kejahatan lainnya. Meskipun sudah ada upaya pemberantasan, korupsi masih saja merajalela dan bahkan dianggap biasa oleh sebagian masyarakat."

Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia bukanlah sebuah fenomena baru. Upaya untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan melawan tindakan korupsi telah dimulai sejak lama, seiring dengan kesadaran akan bahaya korupsi terhadap pembangunan negara. Dalam perjalanan panjang sejarah kehidupan negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pendidikan anti korupsi menjadi bagian yang penting untuk diketahui dan dipahami. Sebelum membicarakan pendidikan anti korupsi, penting untuk memahami sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya-upaya pemberantasan korupsi secara yuridis sudah dimulai sejak Orde Lama dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 tentang Langkah Pemberantasan Korupsi.

Akan tetapi baru pada era reformasi semangat pemberantasan korupsi semakin menguat. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN menjadi tonggak penting dalam upaya ini. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan lembaga-lembaga anti korupsi seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).

Pendidikan Anti Korupsi sebagai Solusi Jangka Panjang melihat bahwa tindakan represif saja tidak cukup untuk memberantas korupsi, maka muncul kesadaran akan pentingnya pencegahan. Pendidikan anti korupsi kemudian menjadi salah satu solusi jangka panjang yang dianggap paling efektif.

Mengapa Pendidikan Anti Korupsi Penting? Ada beberapa alasan mengapa pendidikan anti korupsi sejak dini diperkenalkan kepada anak-anak hingga nantinya mereka tumbuh dewasa, oleh karena itu perlu untuk :

- a. Mencegah sejak dini, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak usia dini, diharapkan generasi muda tumbuh menjadi individu yang berintegritas dan menolak segala bentuk korupsi.
- b. Membentuk karakter bahwa pendidikan anti korupsi tidak hanya mengajarkan tentang hukum dan peraturan, tetapi juga membentuk karakter individu yang bertanggung jawab, jujur, dan peduli terhadap kepentingan umum.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat, hal ini karena pendidikan anti korupsi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Perwujudan dari upaya pemberantasan korupsi tersebut perlu diimplementasi melalui pendidikan anti korupsi di Indonesia dengan berbagai cara, yakni integrasi ke dalam kurikulum: Materi anti korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga

perguruan tinggi. Jika melihat kepada beberapa program studi yang ada pada perguruan tinggi di Indonesia terdapat beberapa program studi dengan latar belakang hukum yang mencantumkan pendidikan anti korupsi sebagai salah satu mata kuliah dalam kurikulumnya. Mestinya oleh karena tanggung jawab pendidikan dan pencegahan korupsi ini harus menjadi bagian dalam kehidupan dilingkungan pendidikan tinggi maka semua program studi harus memuat pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua mahasiswa.

Program ekstrakurikuler bahwa sekolah-sekolah sering mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan anti korupsi, seperti debat, lomba essay, atau simulasi sidang dengan muatan pesan dan pendidikan anti korupsi, misalnya dengan membuat kompetisi design poster-poster anti korupsi. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi masyarakat gamam hal ini pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering mengadakan sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat luas. Dukungan dan pemanfaatan media sangat penting, media massa, baik cetak maupun elektronik, juga berperan penting dalam menyebarkan pesan-pesan anti korupsi.

Meskipun upaya pendidikan anti korupsi terus dilakukan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anti korupsi, kurangnya sumber daya yang memadai, dan masih adanya praktik korupsi yang sulit diberantas, harapan akan masa depan yang lebih baik tetap ada. Dengan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan anti korupsi dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dari korupsi.

Melihat fenomena korupsi maka akan terlihat bahwa ini bukan sekadar tindakan melanggar hukum, melainkan sebuah sistem yang kompleks dengan akar yang dalam dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang anti korupsi pun harus lebih luas dan menyeluruh.

Dimensi Korupsi mencakup bidang-bidang yang cukup luas, di bidang politik korupsi dalam politik seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti suap, kolusi, dan nepotisme. Di bidang ekonomi yaitu korupsi dalam ekonomi meliputi tindakan-tindakan yang merugikan negara, seperti penggelapan uang negara, pencucian uang, dan praktik monopoli. Dan juga di bidang sosial budaya berupa nilai-nilai budaya yang permisif terhadap korupsi, seperti nepotisme dan kolusi, dapat memperkuat praktik korupsi.

Akar masalah korupsi yang terjadi secara sistemik dalam sistem pemerintahan yang lemah, birokrasi yang rumit, dan kurangnya transparansi dapat menciptakan peluang untuk korupsi. Lalu kultural atau budaya adalah nilai-nilai budaya yang toleran terhadap korupsi, seperti budaya balas budi dan paternalisme, dapat memperkuat praktik korupsi. Lalu menyeruak juga dalam bidang ekonomi: dimana ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan korupsi demi meningkatkan kesejahteraannya.

Pendekatan Anti Korupsi dalam berbagai bentuknya antara lain dalam bidang hukum, bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi adalah langkah penting dalam pemberantasan korupsi. Dalam kerangka ilmiah atau dunia pendidikan bahwa pendidikan anti korupsi sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Kehidupan sosial yang dapat diwujudkan melalui penguatan nilai-nilai sosial seperti kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dapat mengurangi praktik korupsi. Sehingga tidak hanya tindak korupsi yang terjadi secara sistemik tetapi upaya pencegahan dan pemberantasannya juga secara sistemik melalui reformasi sistem pemerintahan dan birokrasi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang masih menghambat kemajuan Indonesia. Meskipun sudah banyak upaya untuk memberantasnya, praktik korupsi masih terjadi di banyak sektor, baik di pemerintahan, dunia usaha, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan sosial serta ekonomi.

Ada banyak faktor yang menyebabkan korupsi di Indonesia, salah satunya adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini memungkinkan banyak orang untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, kurangnya pemahaman dan pendidikan tentang etika dan integritas di berbagai lapisan masyarakat turut menjadi pemicu timbulnya perilaku koruptif.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan pendidikan antikorupsi sejak dini sampai di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memegang peran penting dalam membentuk karakter dan sikap mahasiswa. Sebagai tempat untuk menimba ilmu, perguruan tinggi seharusnya tidak hanya fokus pada pengajaran ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan pribadi mahasiswa yang memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Pendidikan anti korupsi dapat membantu mahasiswa memahami dampak buruk dari korupsi dan mengajarkan mereka untuk menghindari perilaku tersebut dalam kehidupan profesional mereka nanti.

Mahasiswa sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi korupsi. Mereka adalah generasi penerus yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa ini. Dengan bekal pendidikan yang tepat, mahasiswa bisa menjadi agen perubahan yang tidak hanya menghindari korupsi, tetapi juga aktif mengadvokasi budaya anti-korupsi di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sangat penting, karena dapat membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk melawan korupsi dan memperbaiki sistem yang ada.

Pendidikan antikorupsi (PAK) sejak dini penting dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya tindakan korupsi. PAK dapat dilakukan dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi adalah penyakit sosial yang merugikan banyak pihak. Sederhananya, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, baik itu berupa uang, jabatan, atau fasilitas lainnya. Tindakan ini seringkali melanggar hukum dan merugikan negara serta masyarakat. Bentuk korupsi ini meliputi suap yaitu memberikan atau menerima uang atau hadiah untuk memengaruhi keputusan seseorang yang memiliki wewenang, kolusi yaitu persekongkolan sekelompok orang untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau lembaga, dan nepotisme yaitu memberikan keistimewaan kepada keluarga atau kerabat dalam hal pekerjaan atau jabatan.

Korupsi seperti yang telah kita ketahui, adalah sebuah fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, ekonomi, dan politik, telah mencoba untuk memahami akar penyebab, dampak, dan solusi dari masalah ini. Berikut adalah beberapa sudut pandang atau perspektif mengenai korupsi.

### 1. Perspektif Sosiologis:

Para sosiolog melihat korupsi sebagai sebuah produk dari struktur sosial dan budaya. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, seperti individualisme yang berlebihan, nepotisme, dan kolusi, dapat mendorong terjadinya korupsi.

- Durkheim, dalam sudut pandangnya mengkaitkan korupsi dengan anomie, yaitu kondisi di mana norma-norma sosial melemah atau tidak jelas.
- Weber, justru melihat birokrasi sebagai salah satu sumber potensial korupsi, terutama jika birokrasi tersebut terlalu kompleks dan tidak transparan.

### 2. Perspektif Ekonomi:

Ekonom melihat korupsi sebagai kegagalan pasar yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi, ketidakpastian hukum, dan kurangnya persaingan.

- Kornai, mengatakan bahwa korupsi adalah hasil dari kekurangan pasokan dan kelebihan permintaan, yang menciptakan insentif bagi pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaannya.
- Olson, menjelaskan bahwa kelompok kepentingan (interest groups) yang kuat dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga membuka peluang untuk korupsi.

### 3. Perspektif Politik:

Para ahli politik melihat korupsi sebagai akibat dari sistem politik yang lemah, kurangnya akuntabilitas, dan konsentrasi kekuasaan pada segelintir orang.

- Huntington, memberikan satu argumen bahwa tingkat korupsi suatu negara dipengaruhi oleh tingkat modernisasi dan demokratisasi.
- Myrdal, kemudian melihat korupsi sebagai masalah yang sistemik dalam pemerintahan, yang disebabkan oleh kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran.

#### 4. Perspektif Hukum:

Ahli hukum berfokus pada aspek legal dari korupsi. Mereka melihat korupsi sebagai pelanggaran hukum dan menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi. Fockema, mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan busuk yang tidak sesuai norma, didasari pada kebiasaan, dan dilakukan ketika memiliki kesempatan. Korupsi merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Untuk memberantas korupsi, diperlukan upaya bersama dari seluruh komponen masyarakat. Dengan memahami perspektif para ahli, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

Pendidikan anti korupsi sejak dini merupakan upaya proaktif untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab pada anak sejak usia dini. Tujuannya adalah membentuk karakter individu yang menolak segala bentuk korupsi dan menjadi agen perubahan di masa depan.

Beberapa penelitian dan studi menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi sejak dini memiliki dampak yang positif. Suatu hasil penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi pada anak usia dini adalah untuk membantu anak memahami perilaku anti koruptif, membentuk sikap dan perilaku anti korupsi, mencegah anak melakukan perbuatan korupsi, mencetak generasi bangsa yang memiliki integritas diri yang tinggi. Studi kasus di berbagai sekolah juga menunjukkan bahwa banyak sekolah telah menerapkan program pendidikan anti korupsi sejak dini dan menunjukkan hasil yang positif, seperti meningkatnya kesadaran siswa tentang pentingnya kejujuran dan integritas. Implementasi pendidikan anti korupsi sejak dini yaitu guru sedang memberikan materi pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sejak dini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui integrasi ke dalam kurikulum: Materi anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, seperti PPKn, Bahasa Indonesia, atau Matematika. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler dalam hal ini sekolah dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan anti korupsi, seperti lomba debat, menulis essay, atau drama. Selanjutnya kerja sama dengan keluarga: Sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan pendidikan anti korupsi di rumah, dan pemanfaatan media: Media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat digunakan untuk menyampaikan materi anti korupsi kepada anak-anak.

Pendidikan anti korupsi sejak dini merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi penerus yang berintegritas dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pendidikan anti korupsi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan konsep-konsep yang relevan dengan pendidikan anti korupsi dan pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Melalui kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kurikulum pendidikan tinggi mengenai pendidikan anti korupsi dan pencegahan korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan landasan hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Analisis terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan baik di lingkungan kementerian-kementerian tertentu, lembaga legislatif, dan juga di badan usaha milik negara (BUMN), seperti skandal PT Asuransi Jiwasraya. Studi kasus ini digunakan untuk mengidentifikasi pola korupsi yang terjadi, kelemahan dalam pengawasan internal, dan peran lembaga pengawasan eksternal dalam pemberantasan korupsi di BUMN.
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Melalui kajian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan konsep-konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan di BUMN, termasuk pengawasan internal, peran serta masyarakat, serta etika berlandaskan Pancasila. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kasus korupsi, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang mendalam, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan merumuskan solusi yang efektif.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pemberantasan korupsi dan perlunya pendidikan anti korupsi sejak dini, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat guna meningkatkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel di lembaga pemerintahan, maupun di badan usaha milik negara (BUMN).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendidikan Anti-Korupsi Di Lingkungan Keluarga*

Selama satu decade skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis Transparency International selalu naik. Tahun lalu, Indonesia mendapat



skor 40. Namun angka tersebut masih dibawah skor rata-rata dunia sebesar 43 dan skor rata-rata ASEAN sebesar 46.

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat serius, menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang meluas ke berbagai bidang kehidupan. Meskipun merugikan secara finansial bagi negara, dampak yang lebih sulit untuk diperbaiki adalah kerugian moral dan mental yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Berdasarkan penyelidikan melalui berbagai media, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan dan berlanjut hingga masa penjajahan Belanda. Suhartono, seorang sejarawan UGM, mengungkapkan hal ini dalam sebuah seminar mengenai hasil riset lintas klaster humaniora. Dia juga menjelaskan bagaimana korupsi telah terjadi di Indonesia sejak zaman feodal, dengan birokrasi tradisional yang muncul pada masa tersebut menjadi salah satu penyebab berkembangnya pola pikir koruptif. Menurutnya, struktur sosial yang ada sejak zaman dahulu memberikan landasan bagi kelangsungan korupsi, yang terus bertahan sepanjang waktu karena budaya yang toleran terhadap perilaku koruptif tanpa pengawasan atau kontrol yang memadai.

Theodore M. Smith, yang disebut dalam tulisan Mochtar Lubis dan James Scott, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang sifat korupsi di Indonesia. Menurut analisisnya, budaya, ekonomi, dan politik adalah faktor utama penyebab masalah korupsi di Indonesia. Dia juga menyoroti faktor sejarah, khususnya sifat feodal bangsa, sebagai penyebab utama meluasnya korupsi. Faktor tambahan seperti rendahnya kesejahteraan masyarakat, sistem pemerintahan yang sentralistik, dan politik yang terkontaminasi oleh keinginan untuk mengumpulkan uang demi kepentingan partai politik turut memperburuk masalah korupsi. Selain itu, Wertheim juga mencatat bahwa budaya patrimonial di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berkontribusi pada perkembangan korupsi. Ia menjelaskan bahwa hubungan kekeluargaan seringkali lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat, yang membuat pejabat yang berkuasa cenderung menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan keluarga, menciptakan praktik nepotisme yang memperbesar potensi korupsi.

Secara keseluruhan, korupsi di Indonesia adalah masalah yang sudah berlangsung lama dan sangat sulit untuk diatasi, karena telah menjadi bagian dari budaya, kecenderungan, dan gaya hidup masyarakat, seperti yang disampaikan dalam sebuah jurnal internasional yang dikutip oleh Amien Rais. Pada dasarnya, korupsi merupakan tindakan untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah, seringkali melalui suap, pemerasan, gratifikasi, dan tindakan tidak etis lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi antara lain kerugian negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Statistik KPK menunjukkan bahwa jenis korupsi yang paling umum adalah penyuapan, diikuti oleh pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran.

Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain, dan dampaknya sangat merugikan. Menurut Ubis dan Scott (1984), korupsi dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti menghambat pencapaian tujuan pemerintah karena pemborosan dan ketidakefisienan, meningkatkan biaya administrasi dan tambahan biaya akibat suap, serta mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik melalui "komisi." Selain itu, korupsi merusak nilai-nilai moral dan etika, merendahkan martabat pemerintah, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap keadilan. Korupsi juga memberi contoh buruk bagi masyarakat kecil, menghalangi pejabat untuk mengambil langkah penting demi kemajuan negara, dan menyebabkan pejabat lebih memilih mempertahankan kekuasaan daripada bertindak demi kepentingan rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun menurun, mengarah pada upaya yang tidak produktif. Selain itu, korupsi dapat memunculkan fitnah terhadap individu yang menolak berperilaku curang, merusak solidaritas dalam gerakan antikorupsi, dan mengubah keputusan yang seharusnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan uang.

Pendidikan anti-korupsi sejak dini di lingkungan keluarga merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Namun, keberhasilan upaya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan:

1. Model Peran Orang Tua

Konsistensi antara ucapan dan tindakan: Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Jika orang tua seringkali melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai anti-korupsi yang diajarkan, maka pesan yang disampaikan akan sulit diinternalisasi anak. Keteladanan dalam kehidupan sehari-hari: Orang tua harus menjadi contoh nyata dalam bersikap jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Komunikasi yang terbuka: Menciptakan suasana di mana anak merasa aman untuk bertanya dan berdiskusi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kejujuran dan integritas.

2. Lingkungan Keluarga yang Kondusif

Suasana keluarga yang harmonis: Keluarga yang harmonis dan saling mendukung akan menciptakan ikatan emosional yang kuat antara anggota keluarga, sehingga pesan-pesan positif lebih mudah diterima. Adanya aturan dan konsekuensi yang jelas: Aturan yang jelas dan konsisten akan membantu anak memahami batasan-batasan yang ada dan pentingnya berperilaku sesuai norma. Dukungan dari anggota keluarga lainnya: Keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi akan memperkuat pesan yang disampaikan.

3. Metode Pendidikan yang Efektif

Pengajaran yang menyenangkan: Menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif, seperti permainan, cerita, atau diskusi, dapat membuat anak lebih antusias dalam belajar. Relevansi dengan kehidupan sehari-hari: Menghubungkan nilai-nilai anti-korupsi dengan situasi nyata yang dialami anak akan membuat pembelajaran lebih bermakna. Penguatan positif:

Memberikan pujian dan penghargaan atas perilaku yang positif akan memotivasi anak untuk terus berbuat baik.

#### 4. Faktor Eksternal

Lingkungan sosial: Lingkungan sosial di sekitar keluarga, seperti teman sebaya, tetangga, dan komunitas, dapat mempengaruhi nilai-nilai yang dianut anak. Media massa: Paparan terhadap media massa yang tidak sehat dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan moral anak. Sistem pendidikan: Kualitas pendidikan di sekolah juga berperan penting dalam membentuk karakter anak.

#### 5. Faktor Internal Anak

Temperamen: Setiap anak memiliki temperamen yang berbeda-beda, sehingga respon mereka terhadap pendidikan anti-korupsi juga akan berbeda. Kecerdasan emosional: Anak dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih mudah memahami dan merespon nilai-nilai moral. Pengalaman pribadi: Pengalaman pribadi anak, baik yang positif maupun negatif, dapat membentuk pandangan dan perilaku mereka.

Upaya untuk Meningkatkan Keberhasilan Pendidikan Anti-Korupsi di Keluarga:

- Program pendidikan orang tua: Memberikan pelatihan kepada orang tua tentang cara menanamkan nilai-nilai anti-korupsi pada anak.
- Kolaborasi dengan sekolah: Membangun kerjasama antara keluarga dan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
- Pemanfaatan teknologi: Menggunakan media sosial dan teknologi lainnya untuk menyebarkan informasi dan materi pendidikan anti-korupsi.
- Evaluasi secara berkala: Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

### ***Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti-Korupsi Pada Anak Sejak Dini***

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, diharapkan upaya pendidikan anti-korupsi di lingkungan keluarga dapat lebih efektif dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

Korupsi di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, menurut Wiryawan (2016). Salah satu faktor utama yang mendasari tingginya angka korupsi adalah anggapan bahwa kekayaan merupakan ukuran utama kesuksesan dalam hidup, yang mendorong banyak orang untuk mencari kekayaan dengan cara apa pun, termasuk melalui praktik korupsi. Keinginan untuk memperoleh kekayaan secara cepat dan mudah mengarah pada penggunaan cara-cara ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Berikut beberapa faktor penyebab korupsi yang lebih mendalam:

- a. Faktor Pribadi: Kesenak-kenyamanan dan materialisme adalah akar utama dari praktik korupsi. Ketika masyarakat lebih memprioritaskan kekayaan dan kemewahan sebagai tanda keberhasilan, pejabat publik dan individu-individu dalam kekuasaan cenderung tergoda untuk terlibat dalam

korupsi. Selain itu, gaya hidup konsumeris yang berkembang di kalangan sebagian besar masyarakat, yang menginginkan kehidupan serba mewah meskipun tidak memiliki penghasilan yang memadai, turut memperburuk situasi ini. Keinginan untuk menjadi kaya dalam waktu singkat, tanpa melalui usaha yang sah, sering kali menjadi pendorong kuat bagi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini semakin diperburuk oleh budaya politik uang yang merajalela, di mana kekuasaan seringkali dibeli dan dijual untuk memperoleh keuntungan pribadi.

- b. Faktor Keluarga dan Masyarakat: Korupsi juga dipicu oleh pengaruh lingkungan sekitar, baik dari keluarga maupun masyarakat. Di beberapa kasus, dorongan untuk melakukan korupsi datang dari keluarga yang memberikan perlindungan atau bahkan dukungan terhadap perilaku koruptif, menganggapnya sebagai cara untuk meningkatkan status sosial atau ekonomi keluarga. Di sisi lain, budaya korup yang sudah mengakar dalam masyarakat membuat tindakan tersebut tampak sebagai hal yang biasa, bahkan diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman tentang dampak buruk korupsi terhadap negara dan masyarakat, serta ketidakmampuan untuk melihat korupsi sebagai pelanggaran moral yang serius, semakin memperburuk masalah ini.
- c. Faktor Ekonomi dan Politik: Kondisi ekonomi yang buruk, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial yang tinggi, menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam praktik korupsi. Di sisi lain, kelemahan dalam sistem politik, seperti kurangnya pengawasan yang efektif terhadap perilaku pejabat publik, memungkinkan praktik korupsi berkembang tanpa hambatan. Kontrol sosial yang lemah dan pengawasan yang tidak memadai dari lembaga negara serta organisasi masyarakat sipil (LSM) membuat banyak pejabat merasa tidak diawasi dan dapat bebas melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, budaya politik uang yang kental di dalam sistem politik Indonesia turut memfasilitasi tumbuhnya praktik-praktik korup yang semakin merajalela.
- d. Faktor Organisasi: Dalam beberapa kasus, budaya organisasi yang buruk turut menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya korupsi. Ketika suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun perusahaan, tidak memiliki mekanisme pengawasan internal yang baik, maka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar. Kepemimpinan yang tidak memberikan contoh yang baik dalam hal integritas dan akuntabilitas dapat mendorong bawahannya untuk mengikuti jejak yang sama. Selain itu, kurangnya rasa tanggung jawab dalam sebuah organisasi juga berperan dalam memperburuk situasi, di mana pejabat atau anggota organisasi merasa bebas melakukan tindakan koruptif tanpa takut akan sanksi.
- e. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum: Salah satu faktor utama yang memperburuk masalah korupsi adalah lemahnya penegakan hukum. Ketidakberdayaan sistem hukum untuk menindak tegas para pelaku

korupsi, serta tidak adanya atau lemahnya sanksi terhadap pelaku, membuat korupsi terus berkembang. Koruptor sering kali merasa aman karena mereka tahu bahwa kemungkinan untuk dihukum sangat kecil. Selain itu, ketika aparat penegak hukum sendiri terlibat dalam korupsi, ketidakadilan dalam sistem hukum semakin memperburuk keadaan. Pejabat yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi bagian dari masalah, menjadikan upaya pemberantasan korupsi semakin sulit dilakukan.

### ***Model Pendidikan Yang Efektif Untuk Diterapkan Dalam Keluarga Guna Membentuk Karakter Anti-Korupsi Pada Anak?***

Pendidikan antikorupsi sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter dan kesadaran moral generasi muda agar dapat menghindari perilaku koruptif di masa depan. Sejak usia dini, individu seharusnya dikenalkan pada nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Hal ini tidak hanya membentuk pola pikir yang sehat tentang pentingnya bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, tetapi juga membekali anak-anak dengan pemahaman tentang dampak buruk korupsi terhadap masyarakat dan negara.

Pendidikan antikorupsi di sekolah dapat memberikan wawasan mengenai konsekuensi dari tindakan korupsi, baik secara hukum maupun sosial, sehingga anak-anak dapat memahami bahwa korupsi bukanlah jalan untuk mencapai kesuksesan. Ini juga menjadi langkah preventif untuk mengurangi kecenderungan terlibat dalam praktik-praktik koruptif di kemudian hari. Dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan, baik formal maupun non-formal, diharapkan generasi mendatang dapat memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya menjaga moralitas, serta dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kegiatan menanamkan jiwa antikorupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau tindakan. Beberapa cara tersebut, di antaranya melalui:

1. Melalui Keteladanan

Memberikan contoh adalah salah satu cara yang paling efektif, termasuk bagi guru. Anak-anak cenderung meniru perilaku di sekitarnya, oleh karena itu guru harus selalu memberikan contoh yang baik, sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Memberikan contoh di sini tidak hanya sekadar menjelaskan perilaku antikorupsi, tetapi juga dengan mengamalkan perilaku tersebut. Guru harus menunjukkan sikap jujur, tidak berbohong, dan tidak mengambil yang bukan haknya, agar siswa dapat mencontohnya.

2. Melalui Pembiasaan

Pembiasaan adalah salah satu metode yang efektif untuk mendidik siswa. Dengan cara ini, diharapkan siswa akan terbiasa melakukan tindakan yang positif. Misalnya, untuk menanamkan nilai antikorupsi, sekolah dapat mengadakan kantin kejujuran. Di sana, siswa diajarkan untuk bersikap jujur, dengan mengambil jajanan, membayar, menghitung, dan menerima kembalian sendiri. Jika siswa ketahuan tidak

jujur, mereka akan diberikan hukuman yang sesuai untuk memberikan efek jera, sehingga mereka tidak mengulanginya lagi.

3. Melalui Kurikulum

Nilai antikorupsi juga dapat diajarkan melalui kurikulum atau program sekolah. Dalam hal ini, peran guru sangat penting untuk menanamkan karakter antikorupsi pada siswa, melalui silabus yang lengkap dan Rencana Program Pembelajaran (RPP). Dengan kurikulum yang tepat, guru dapat membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang memiliki nilai-nilai antikorupsi.

4. Memahami Sembilan Pilar Karakter

Guru dan siswa perlu memahami sembilan pilar karakter yang diambil dari nilai-nilai luhur universal. Pilar-pilar tersebut meliputi cinta kepada Tuhan dan makhluk ciptaan-Nya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomasi, rasa hormat, dermawan, kerja sama, kepemimpinan, keadilan, rendah hati, serta toleransi dan kedamaian. Pilar-pilar ini diajarkan secara sistematis melalui model pendidikan holistik yang melibatkan tiga tahap seperti, mengetahui yang baik, merasakan yang baik, dan bertindak sesuai kebaikan. Pengetahuan tentang kebaikan mudah diajarkan secara kognitif, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan, karena rasa cinta itulah yang mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik. Setelah kebajikan menjadi kebiasaan, maka perilaku tersebut akan terus terjalin.

Pendidikan karakter ini sebaiknya dimulai sejak usia dini, yang dikenal sebagai usia emas, karena pada masa ini anak memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan pendidikan karakter yang terstruktur dan berkelanjutan, seorang anak akan berkembang menjadi pribadi yang cerdas emosinya, yang merupakan bekal penting untuk menghadapi tantangan kehidupan, termasuk dalam melawan korupsi.

### ***Peran Mahasiswa Dalam Pendidikan Antikorupsi***

Pendidikan antikorupsi juga dapat membantu menciptakan budaya yang lebih baik dalam masyarakat, di mana kejujuran dan transparansi dihargai. Dengan membangun budaya antikorupsi sejak dini, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan integritas dalam kehidupan sosial dan profesional mereka. Pendidikan antikorupsi bukan hanya sebagai alat untuk menanggulangi korupsi, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan sejahtera.

Mahasiswa di perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam pendidikan antikorupsi. Sebagai generasi muda yang terdidik, mereka dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi perubahan positif di masyarakat melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Menyebarkan Nilai-Nilai Antikorupsi

Mahasiswa bisa menjadi duta antikorupsi dengan menyebarkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan transparansi di lingkungan kampus dan masyarakat. Mereka bisa mengadakan seminar, diskusi, atau kampanye untuk mengedukasi sesama mahasiswa dan masyarakat mengenai bahaya korupsi serta pentingnya berperilaku jujur.

b. Menjadi Teladan dalam Perilaku Akademik

Sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan, mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas akademik. Dengan menghindari plagiarisme, kecurangan dalam ujian, dan praktik tidak jujur lainnya, mahasiswa dapat menunjukkan bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam meraih kesuksesan akademik. Perilaku mereka yang bersih dari tindakan curang menjadi contoh konkret bagi rekan-rekan mereka.

c. Mengkritisi dan Mendorong Kebijakan yang Bersih dari Korupsi

Mahasiswa, sebagai kelompok intelektual, dapat menggunakan suara mereka untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan di tingkat kampus atau bahkan di tingkat pemerintahan yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi. Mereka bisa terlibat dalam forum diskusi, aksi, atau bahkan penelitian yang mengangkat isu-isu korupsi dalam sistem pendidikan dan pemerintahan. Dengan cara ini, mereka berperan aktif dalam mendorong perubahan sistemik yang lebih bersih dan transparan.

d. Mengembangkan Kepemimpinan yang Berintegritas

Dalam organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dapat mempraktekkan kepemimpinan yang jujur, adil, dan transparan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam pengelolaan organisasi, seperti dalam penggunaan anggaran atau pemilihan ketua organisasi, mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bersih dan bertanggung jawab itu mungkin dilakukan.

e. Menjadi Peneliti dan Penggerak Solusi

Mahasiswa juga bisa berperan sebagai peneliti yang menggali lebih dalam masalah korupsi, baik itu di tingkat lokal, nasional, atau bahkan global. Melalui penelitian dan kajian, mahasiswa dapat menemukan solusi-solusi baru untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar untuk mengusulkan perubahan kebijakan atau inovasi dalam pencegahan korupsi.

f. Mengaplikasikan Pendidikan Antikorupsi dalam Kehidupan Sehari-hari

Pendidikan antikorupsi yang diterima di kampus dapat diterapkan langsung oleh mahasiswa dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Dengan menunjukkan perilaku antikorupsi dalam keseharian, mereka menjadi contoh nyata bagi orang lain, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, bahwa korupsi tidak memiliki tempat dalam kehidupan mereka.

g. Membangun Jaringan untuk Perubahan Sosial

Mahasiswa memiliki akses yang luas terhadap berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis, pemerintah, dan masyarakat. Dengan membangun jaringan atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang peduli terhadap

pemberantasan korupsi, mahasiswa dapat menggerakkan perubahan sosial yang lebih besar. Melalui kemitraan ini, mereka dapat memperkuat kampanye antikorupsi yang lebih luas dan mendalam.

Sebagai agen perubahan, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dapat menjadi pelaku nyata dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi. Melalui peran aktif ini, mereka dapat mewujudkan masa depan yang lebih bersih, adil, dan berintegritas, baik di dalam kampus maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberhasilan pendidikan anti-korupsi dalam lingkungan keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, yaitu komitmen yang kuat dari orang tua untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi pada anak-anak merupakan faktor paling penting, penggunaan metode pendidikan yang tepat, seperti storytelling, diskusi, dan contoh nyata, dapat membuat anak-anak lebih mudah memahami dan mengingat nilai-nilai anti-korupsi, dan lingkungan keluarga yang harmonis, terbuka, dan saling mendukung akan menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembang nilai-nilai positif pada anak. Pentingnya memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga kecil akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan, dan juga orang tua perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang korupsi, dampaknya, dan cara mencegahnya agar dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada anak-anak.
2. Orang tua memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi pada anak sejak dini. Mereka adalah role model pertama dan utama bagi anak-anak. Melalui tindakan, kata-kata, dan interaksi sehari-hari, orang tua dapat membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi individu yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kepentingan bersama.
3. Pendidikan anti-korupsi dalam keluarga merupakan fondasi penting dalam membangun karakter anak yang berintegritas. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan model pendidikan yang efektif dan berkelanjutan, tidak ada satu model pendidikan yang paling efektif. Pemilihan model pendidikan yang tepat tergantung pada usia anak, minat anak, dan kondisi keluarga. Yang terpenting adalah konsistensi dan keteladanan dari orang tua. Dengan menerapkan model-model pendidikan yang tepat, orang tua dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang berintegritas dan memiliki karakter anti-korupsi.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini menghadirkan pendekatan baru yang menghasilkan temuan signifikan dan berpotensi membuka peluang inovasi serta aplikasi lebih lanjut.



## DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

\_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Chazawi, Adami, (2017), Hukum Pidana Korupsi Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Gusti Kadek Sintia Dewi, Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2 Nomor 4, Oktober 2022.

Hanafiah Erma, (2019), Stop Korupsi, Loka Aksara, Tangerang.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>

Ni Ketut Dessy Fitri Yanti Dewi, Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi , Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 Nomor 1, Januari 2023.

Sasongko, Warso (2017), Korupsi, Relasi Inti Media, Yogyakarta.

Sukimin, Dewi Tuti Muryati, Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Upaya Pencegahan Dini Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 Juni 2022.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).